

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil yakni penerapan *good governance* yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia, terutama pemerintah daerah di Jawa dan Bali masih belum maksimal, hal ini dikarenakan:

1. Ada beberapa pemerintah daerah yang belum melaksanakan peraturan tentang keterbukaan informasi publik dengan baik, yakni menyediakan informasi keuangan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pada situs resmi pemerintah daerah yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat dari pengkategorian yang dilakukan berdasarkan *Open Budget Index* (OBI). Didapatkan hasil keterbukaan informasi publik yang dilakukan pemerintah daerah Jawa dan Bali masih pada tingkat keterbukaan anggaran dengan tingkat tidak cukup dan pada kategori terbatas sebanyak 12 pemerintah daerah dengan skor 41-60. Kategori minimal sebanyak 39 pemerintah daerah dengan skor 21-40. Kategori sedikit sebanyak 77 pemerintah daerah dengan skor 0-20.
2. Masih banyaknya situs pemerintah yang sulit diakses oleh masyarakat
3. Laporan keuangan yang tidak *update*
4. Untuk mendapatkan laporan keuangan harus melakukan *log in* dengan mengisi data pribadi. Menurut undang-undang No 14 Tahun 2008, setiap

informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapat hasil yakni pemerintah Jombang merupakan pemerintah daerah yang memiliki tingkat transparansi tertinggi pada pemerintah Jawa dan Bali dibandingkan pemerintah daerah di Jawa Bali lainnya, dan pemerintah Bondowoso merupakan pemerintah yang memiliki tingkat transparansi terendah. Hal itu dapat dilihat dari besarnya indeks yang telah dihitung, laporan keuangan yang disediakan pada situs resminya, dan isi laporan keuangan tersebut telah sesuai.

Dari 128 situs pemerintah daerah yang diteliti diambil 5 pemerintah kabupaten yang memiliki tingkat transparansi tertinggi dan terendah. Pemerintah kabupaten yang memiliki tingkat transparansi tertinggi yaitu pemerintah kabupaten Jombang, pemerintah kabupaten Kuningan, pemerintah kabupaten Bojonegoro, pemerintah kabupaten Trenggalek, pemerintah kabupaten Kebumen, dan pemerintah kabupaten yang memiliki tingkat transparansi terendah yaitu pemerintah kabupaten Subang, pemerintah kabupaten Bandung Barat, pemerintah kabupaten Bekasi, pemerintah kabupaten Klukung, pemerintah kabupaten Buleleng, dan pemerintah kabupaten Bondowoso.

Lima pemerintah kabupaten dengan tingkat transparansi tertinggi dan terendah kemudian dilakukan identifikasi karakteristik sehingga didapat hasil yakni pemerintah Jombang yang memiliki tingkat transparansi

tertinggi memiliki karakteristik yang unggul pada kekayaan pemerintah daerah dan IPM. Sebaliknya pemerintah Bondowoso yang memiliki tingkat transparansi terendah memiliki kekayaan pemerintah daerah dan IPM yang tergolong rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekayaan pemerintah daerah dan IPM yang besar mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan keterbukaan informasi anggaran terhadap laporan keuangan dan kinerja pemerintahannya pada situs resmi pemerintah daerah.

## 5.2 Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa keterbatasan, keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Ada beberapa pemerintah daerah yang tidak menyediakan menu khusus pada situs resminya tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah, sehingga mempersulit dalam pencarian keterbukaan informasi publik.
2. Beberapa pemerintah daerah *website* resminya tidak dapat diakses.
3. Beberapa pemerintah daerah isi laporan tidak sesuai dengan judul yang ditampilkan.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada dalam penelitian, peneliti memberikan beberapa saran yakni:

1. Pemerintah daerah lebih mempermudah masyarakat dalam mengakses laporan keuangan pemerintah daerah dengan memberikan menu khusus tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah

2. Untuk pemerintah daerah yang *websitenya* tidak dapat diakses sebaiknya memperbaiki, sehingga masyarakat dapat melihat transparansi pengelolaan anggaran daerah pemerintah dan pemerintah juga dapat mempertanggungjawabkan kinerja dan laporan keuangannya pada masyarakat.
3. Untuk pemerintah daerah yang judul dan isi laporan tidak sesuai, memperbaikinya agar isi yang diberikan sesuai dengan judul yang ditampilkan.

#### **5.4 Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang ada dalam penelitian, peneliti memberikan beberapa saran, yakni:

1. Untuk pemerintah daerah lebih meningkatkan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah pada *website* yang telah ada dan lebih mempermudah pengaksesan transparansi tersebut.
2. Untuk pemerintah pusat melakukan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah memberikan informasi keuangan secara lengkap di *websitenya* pada publik, sehingga pemerintah daerah termotivasi untuk lebih meningkatkan transparansinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, Anissa. (2017). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah Se-Jawa. Tesis Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Asroel, Rahmad Bintang Shabri, Yessi Mutia Basri, dan Susilatri. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Pimpinan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). JOM Fekon Vol. 3.
- Bastian, Indra. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga
- Eriyanto. (2011). Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenamedia Group.
- Gismar, Abdul Malik, *et. al.* (2013). *Toward a well-informed society and responsive Government: Executive Report Indonesia Governance Index 2012*. Jakarta: The Partnership for Governance Reform
- Hartono, J. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman. Yogyakarta: BPF
- \_\_\_\_\_. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman. Yogyakarta: BPF
- Hasanah, Uswatun. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Publikasi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet (Studi Kasus pada laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia). Artikel.
- Hendiyani, Ririn dan Afrizal Tahar. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol 22.
- Hermana, Budi., A. Tarigan, H. Medyawati, dan W.Silfianti. (2012). *E-Government Implementation in Indonesia: Financial Transparency on the Web. 3rd International Conference on e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning IPEDR*. Vol. 27

Huwae, Kartini. (2016). Analisis Tingkat Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Tesis Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*.

Ibrahim. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Indrajit, Richardus Eko. (2006). *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi

KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*). (2008). *Pedoman Umum Good Public Governance*.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan BPKP. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi

Martani, Dwi., Debby Fitriasari, dan Annisa. (2014). *Financial and Performance Transparency on the Local Government Websites in Indonesia*. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*. Vol. 60 No.3

Partodihardjo, Soemarno. (2008). *Tentang Keterbukaan Informasi Publik: Tanya Jawab Sekitar Undang-undang No 14 Tahun 2008*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Prabowo, Daniel Wicaksono Adi.(2016). *Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD 114) Melalui Internet (IFLGR) dan faktor-faktor yang mempengaruhi*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Media Ekonomi* Vol XVI No1.

Renas, Dul Muid. (2014). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2009-2011)*. *Diponegoro Journal of Accounting* Vol 4 No 3.

Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. (2011). *Paduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visimedia.

Setyadiharja, Rendra. (2017). *E-Procurement (Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik)*. Jogjakarta: Deepublish.

Setyaningrum, Dyah dan Febriyani Syafitri. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* vol. 9 no 2.

Setyaningrum, Lilies. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol 6.

Siyoto, Sandu dan Muhammad Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sudaryo, Yoyo, Devyanthi Sjarif, dan Nunung Ayu Sofiati. (2017). *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta : ANDI.

Suoth, Novelya, Jantje Tinangon, Sintje Rondonuwu. (2016). Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA* Vol. 4.

Tanjung, Abdul Hafiz. (2009). *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Yuhefizar, HA Mooduto, Rahmat Hidayat. (2009). *Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunakan Content Management Systems Joomla (Edisi Revisi)*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

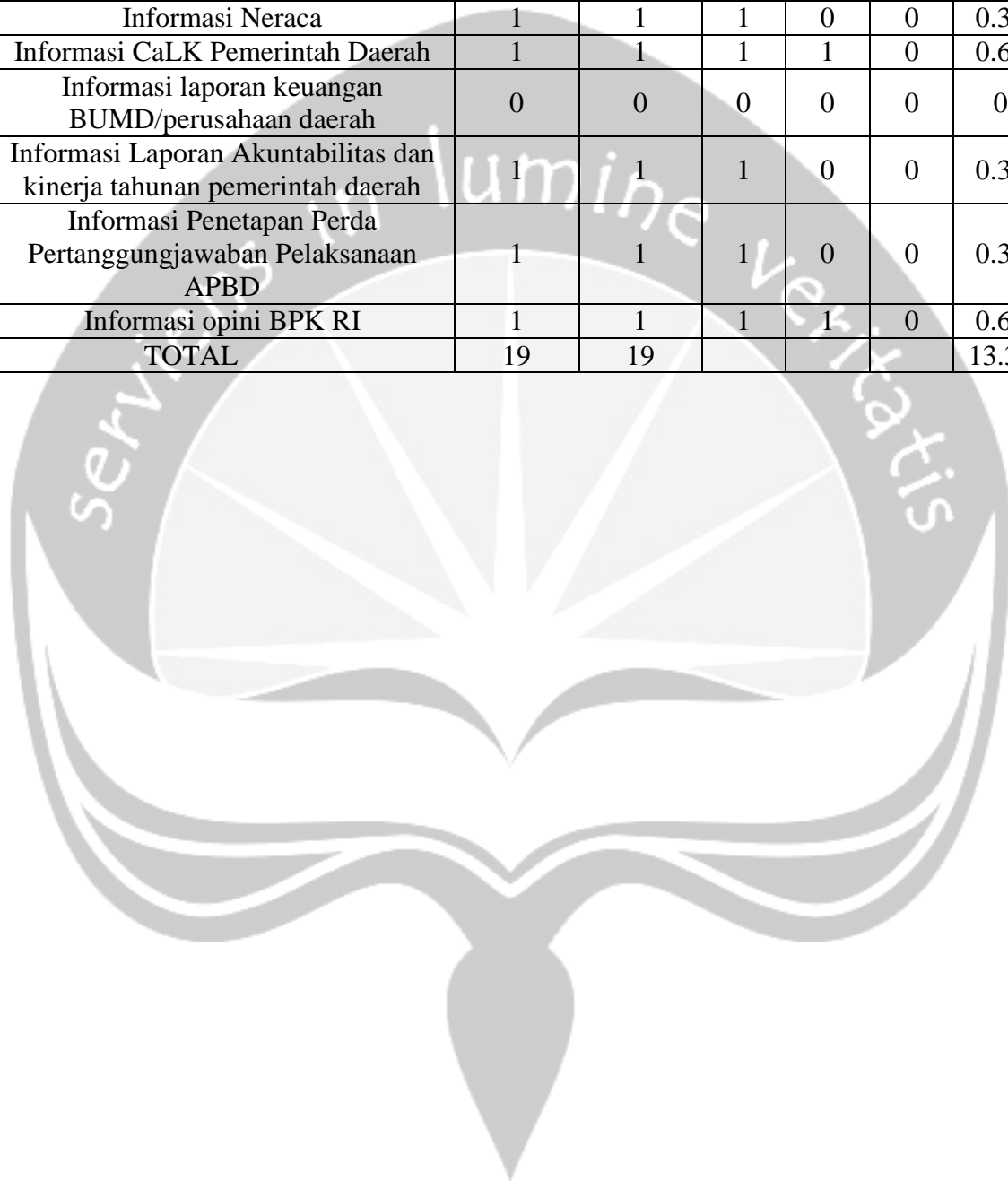
## LAMPIRAN

KABUPATEN JOMBANG								
No	Instrumen	Kriteria						Jumlah
		Tersedia	Dapat Diakses	Frekuensi Pengungkapan				
				2014	2015	2016	Hasil	
1.	Informasi ringkasan dokumen RKPD	1	1	0	1	0	0.33	0.77
2.	Informasi kebijakan umum anggaran	0	0	0	0	0	0	0
3.	Informasi ringkasan dokumen prioritas dan plafon anggaran	0	0	0	0	0	0	0
4.	Informasi ringkasan dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	1	1	0.99
5.	Informasi ringkasan dokumen RKA-PPKD	1	1	1	1	1	1	0.99
6.	Informasi ringkasan dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD	1	1	1	1	1	1	0.99
7.	Informasi peraturan daerah tentang APBD	1	1	1	1	1	1	0.99
8.	Informasi peraturan kepala daerah tentang APBD	1	1	0	1	1	0.67	0.88
9.	Informasi ringkasan DPA SKPD	1	1	1	1	1	1	0.99
10.	Informasi DPA SKPD	0	0	0	0	0	0	0
11.	Informasi realisasi pendapatan daerah	0	0	0	0	0	0	0
12.	Informasi realisasi belanja daerah	0	0	0	0	0	0	0
13.	Informasi realisasi pembiayaan daerah	0	0	0	0	0	0	0
14.	Informasi ringkasan dokumen rancangan perubahan APBD	1	1	1	1	1	1	0.99
15.	Informasi peraturan daerah tentang perubahan APBD	1	1	1	1	1	1	0.99
16.	Informasi peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	1	1	1	1	1	1	0.99
17.	Informasi ringkasan RKA perubahan APBD	1	1	1	1	1	1	0.99
18.	Informasi rencana umum pengadaan	0	0	0	0	0	0	0
19.	Informasi SK kepala daerah tentang pejabat pengelola keuangan daerah	0	0	0	0	0	0	0
20.	Informasi peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi	0	0	0	0	0	0	0
21.	Informasi laporan arus kas	1	1	1	0	0	0.33	0.77
22.	Informasi laporan realisasi anggaran seluruh SKPD	1	1	0	1	0	0.33	0.77
23.	Informasi laporan realisasi anggaran PPKD	1	1	1	0	0	0.33	0.77



**KABUPATEN JOMBANG**

No	Instrumen	Kriteria						Jumlah
		Tersedia	Dapat Diakses	Frekuensi Pengungkapan				
				2014	2015	2016	Hasil	
24.	Informasi Neraca	1	1	1	0	0	0.33	0.77
25.	Informasi CaLK Pemerintah Daerah	1	1	1	1	0	0.67	0.88
26.	Informasi laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah	0	0	0	0	0	0	0
27.	Informasi Laporan Akuntabilitas dan kinerja tahunan pemerintah daerah	1	1	1	0	0	0.33	0.77
28.	Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	1	1	0	0	0.33	0.77
29.	Informasi opini BPK RI	1	1	1	1	0	0.67	0.88
<b>TOTAL</b>		19	19				13.32	16.94



KABUPATEN KUNINGAN								
No	Instrumen	Kriteria						Jumlah
		Tersedia	Dapat Diakses	Frekuensi Pengungkapan				
				2014	2015	2016	Hasil	
1.	Informasi ringkasan dokumen RKPD	0	0	0	0	0	0	0
2.	Informasi kebijakan umum anggaran	0	0	0	0	0	0	0
3.	Informasi ringkasan dokumen prioritas dan plafon anggaran	0	0	0	0	0	0	0
4.	Informasi ringkasan dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	0	0.67	0.88
5.	Informasi ringkasan dokumen RKA-PPKD	1	1	1	1	0	0.67	0.88
6.	Informasi ringkasan dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD	1	1	1	1	0	0.67	0.88
7.	Informasi peraturan daerah tentang APBD	1	1	1	1	1	1	0.99
8.	Informasi peraturan kepala daerah tentang APBD	1	1	0	0	1	0.33	0.77
9.	Informasi ringkasan DPA SKPD	1	1	1	0	0	0.33	0.77
10.	Informasi DPA SKPD	1	1	1	0	0	0.33	0.77
11.	Informasi realisasi pendapatan daerah	1	1	1	0	0	0.33	0.77
12.	Informasi realisasi belanja daerah	0	0	0	0	0	0	0
13.	Informasi realisasi pembiayaan daerah	0	0	0	0	0	0	0
14.	Informasi ringkasan dokumen rancangan perubahan APBD	1	1	1	1	0	0.67	0.88
15.	Informasi peraturan daerah tentang perubahan APBD	1	1	1	1	0	0.67	0.88
16.	Informasi peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	1	1	0	0	1	0.33	0.77
17.	Informasi ringkasan RKA perubahan APBD	0	0	0	0	0	0	0
18.	Informasi rencana umum pengadaan	0	0	0	0	0	0	0
19.	Informasi SK kepala daerah tentang pejabat pengelola keuangan daerah	0	0	0	0	0	0	0
20.	Informasi peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi	0	0	0	0	0	0	0
21.	Informasi laporan arus kas	1	1	1	0	1	0.67	0.88
22.	Informasi laporan realisasi anggaran seluruh SKPD	1	1	1	0	0	0.33	0.77
23.	Informasi laporan realisasi anggaran PPKD	1	1	1	0	1	0.67	0.88
24.	Informasi Neraca	1	1	1	0	1	0.67	0.88
25.	Informasi CaLK Pemerintah Daerah	1	1	1	0	1	0.67	0.88

KABUPATEN KUNINGAN								
No	Instrumen	Kriteria						Jumlah
		Tersedia	Dapat Diakses	Frekuensi Pengungkapan				
				2014	2015	2016	Hasil	
26.	Informasi laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah	1	1	1	0	1	0.67	0.88
27.	Informasi Laporan Akuntabilitas dan kinerja tahunan pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0
28.	Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0	0	0	0	0	0	0
29.	Informasi opini BPK RI	1	1	1	0	1	0.67	0.88
TOTAL		18	18				10.35	15.30

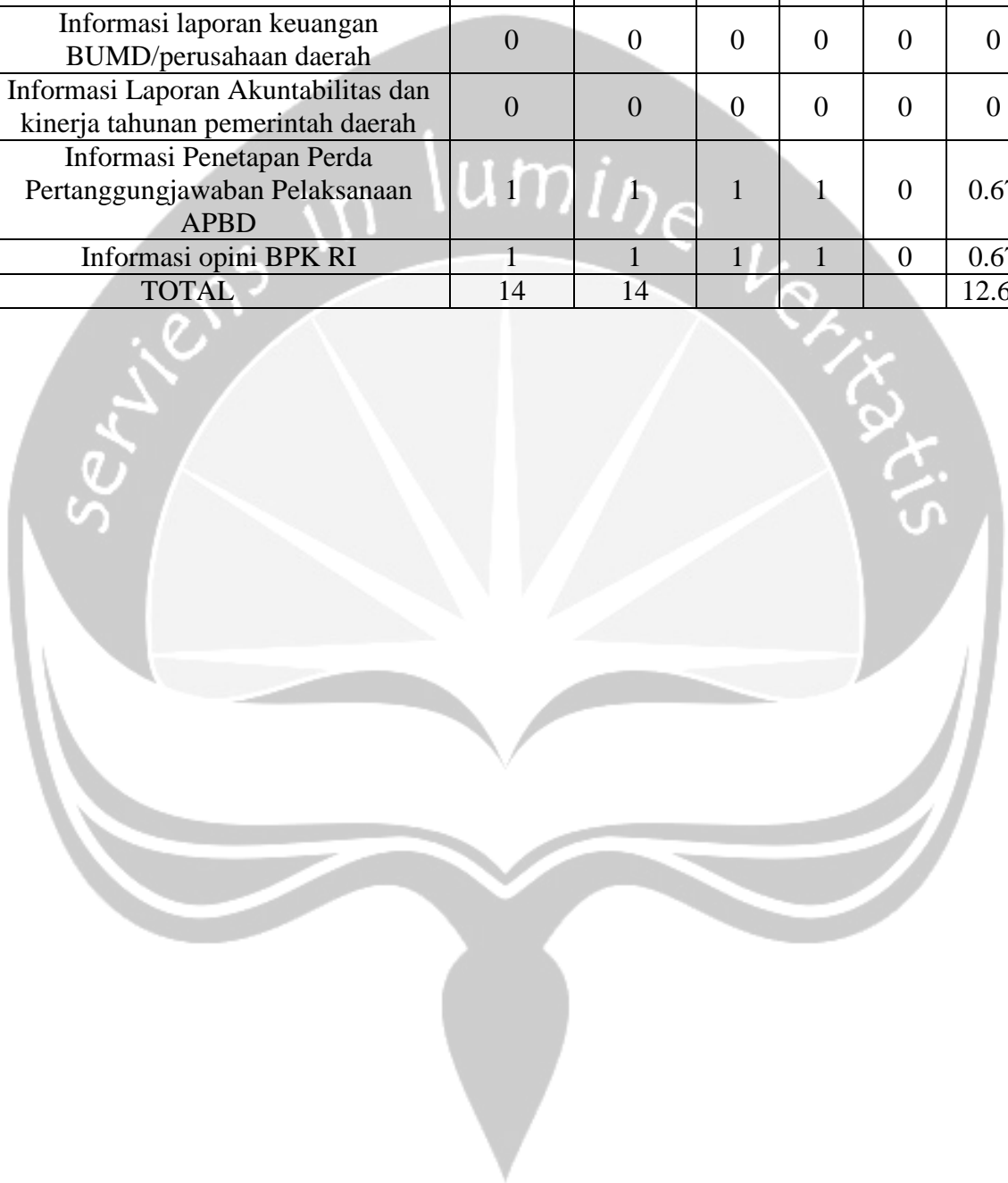


**KABUPATEN BOJONEGORO**

No	Instrumen	Kriteria						Jumlah
		Tersedia	Dapat Diakses	Frekuensi Pengungkapan				
				2014	2015	2016	Hasil	
1.	Informasi ringkasan dokumen RKPD	0	0	0	0	0	0	0
2.	Informasi kebijakan umum anggaran	0	0	0	0	0	0	0
3.	Informasi ringkasan dokumen prioritas dan plafon anggaran	0	0	0	0	0	0	0
4.	Informasi ringkasan dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	1	1	0.99
5.	Informasi ringkasan dokumen RKA-PPKD	1	1	1	1	1	1	0.99
6.	Informasi ringkasan dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD	1	1	1	1	1	1	0.99
7.	Informasi peraturan daerah tentang APBD	1	1	1	1	1	1	0.99
8.	Informasi peraturan kepala daerah tentang APBD	1	1	1	1	1	1	0.99
9.	Informasi ringkasan DPA SKPD	1	1	1	1	1	1	0.99
10.	Informasi DPA SKPD	0	0	0	0	0	0	0
11.	Informasi realisasi pendapatan daerah	0	0	0	0	0	0	0
12.	Informasi realisasi belanja daerah	0	0	0	0	0	0	0
13.	Informasi realisasi pembiayaan daerah	0	0	0	0	0	0	0
14.	Informasi ringkasan dokumen rancangan perubahan APBD	1	1	1	1	1	1	0.99
15.	Informasi peraturan daerah tentang perubahan APBD	1	1	1	1	1	1	0.99
16.	Informasi peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	1	1	1	1	1	1	0.99
17.	Informasi ringkasan RKA perubahan APBD	1	1	1	1	1	1	0.99
18.	Informasi rencana umum pengadaan	0	0	0	0	0	0	0
19.	Informasi SK kepala daerah tentang pejabat pengelola keuangan daerah	0	0	0	0	0	0	0
20.	Informasi peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi	0	0	0	0	0	0	0
21.	Informasi laporan arus kas	0	0	0	0	0	0	0
22.	Informasi laporan realisasi anggaran seluruh SKPD	1	1	1	1	0	0.67	0.88
23.	Informasi laporan realisasi anggaran PPKD	1	1	1	1	0	0.67	0.88
24.	Informasi Neraca	0	0	0	0	0	0	0
25.	Informasi CaLK Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	0

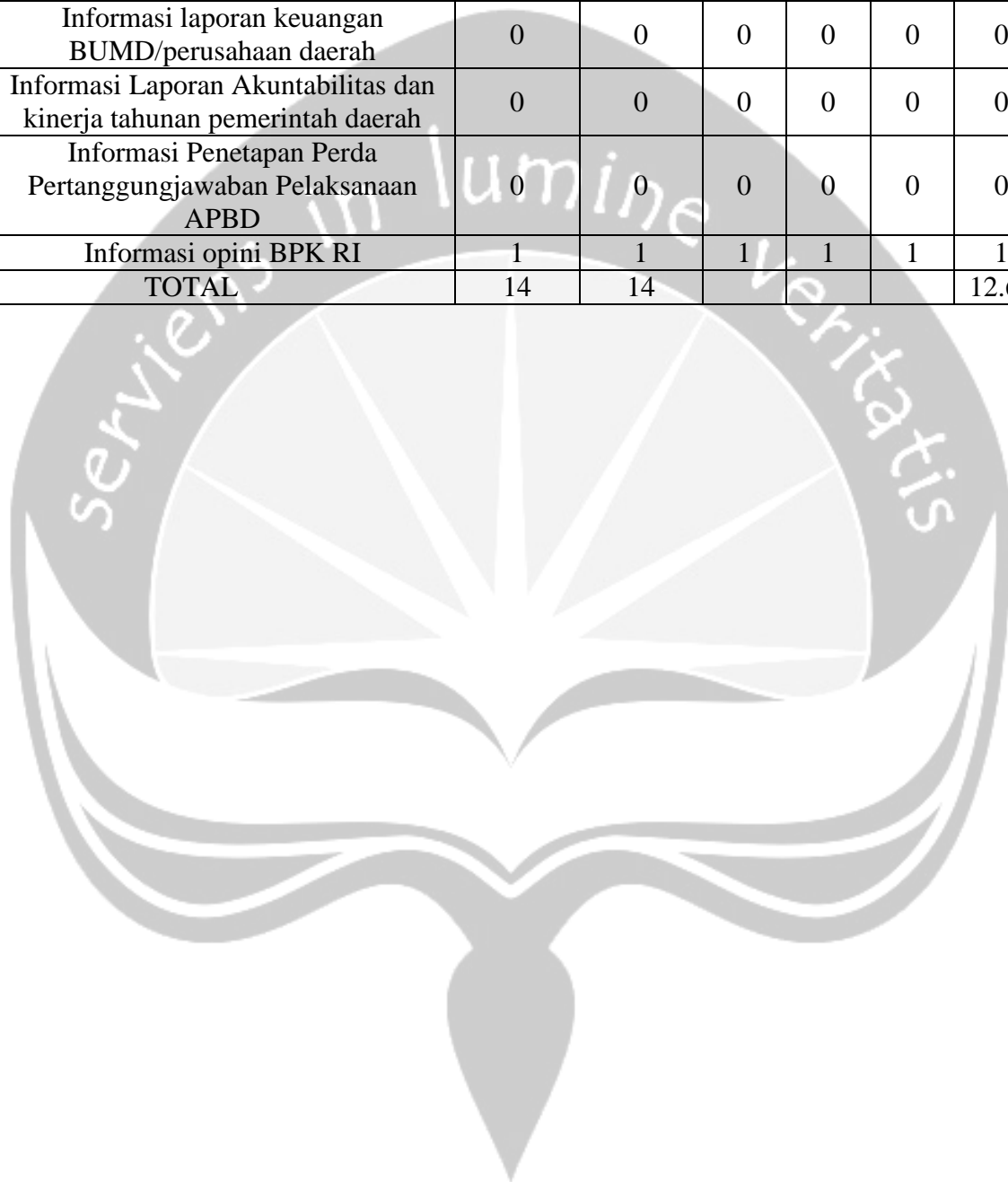
**KABUPATEN BOJONEGORO**

No	Instrumen	Kriteria						Jumlah
		Tersedia	Dapat Diakses	Frekuensi Pengungkapan				
				2014	2015	2016	Hasil	
26.	Informasi laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah	0	0	0	0	0	0	0
27.	Informasi Laporan Akuntabilitas dan kinerja tahunan pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0
28.	Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	1	1	1	0	0.67	0.88
29.	Informasi opini BPK RI	1	1	1	1	0	0.67	0.88
<b>TOTAL</b>		14	14				12.68	13.42





KABUPATEN TRENGGALEK								
No	Instrumen	Kriteria						Jumlah
		Tersedia	Dapat Diakses	Frekuensi Pengungkapan				
				2014	2015	2016	Hasil	
26.	Informasi laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah	0	0	0	0	0	0	0
27.	Informasi Laporan Akuntabilitas dan kinerja tahunan pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0
28.	Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0	0	0	0	0	0	0
29.	Informasi opini BPK RI	1	1	1	1	1	1	0.99
TOTAL		14	14				12.67	13.42

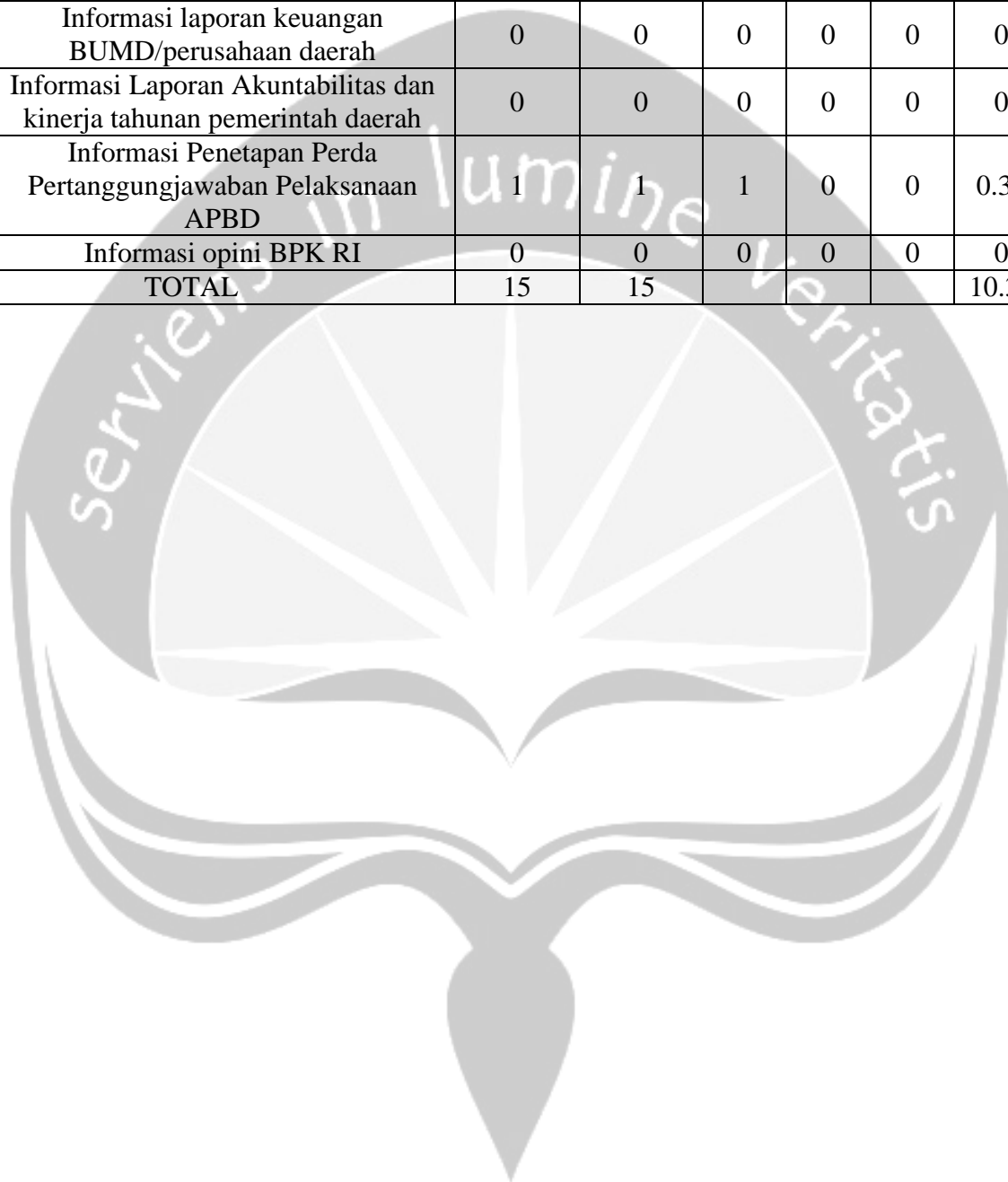


**KABUPATEN KEBUMEN**

No	Instrumen	Kriteria						Jumlah
		Tersedia	Dapat Diakses	Frekuensi Pengungkapan				
				2014	2015	2016	Hasil	
1.	Informasi ringkasan dokumen RKPD	0	0	0	0	0	0	0
2.	Informasi kebijakan umum anggaran	1	1	0	1	1	0.67	0.88
3.	Informasi ringkasan dokumen prioritas dan plafon anggaran	0	0	0	0	0	0	0
4.	Informasi ringkasan dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	1	1	0.99
5.	Informasi ringkasan dokumen RKA-PPKD	1	1	1	1	1	1	0.99
6.	Informasi ringkasan dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD	1	1	0	1	1	0.67	0.88
7.	Informasi peraturan daerah tentang APBD	1	1	1	1	1	1	0.99
8.	Informasi peraturan kepala daerah tentang APBD	1	1	0	1	1	0.67	0.88
9.	Informasi ringkasan DPA SKPD	1	1	1	1	1	1	0.99
10.	Informasi DPA SKPD	0	0	0	0	0	0	0
11.	Informasi realisasi pendapatan daerah	0	0	0	0	0	0	0
12.	Informasi realisasi belanja daerah	0	0	0	0	0	0	0
13.	Informasi realisasi pembiayaan daerah	0	0	0	0	0	0	0
14.	Informasi ringkasan dokumen rancangan perubahan APBD	0	0	0	0	0	0	0
15.	Informasi peraturan daerah tentang perubahan APBD	1	1	0	1	0	0.33	0.77
16.	Informasi peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	1	1	0	1	0	0.33	0.77
17.	Informasi ringkasan RKA perubahan APBD	0	0	0	0	0	0	0
18.	Informasi rencana umum pengadaan	0	0	0	0	0	0	0
19.	Informasi SK kepala daerah tentang pejabat pengelola keuangan daerah	0	0	0	0	0	0	0
20.	Informasi peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi	0	0	0	0	0	0	0
21.	Informasi laporan arus kas	1	1	1	0	1	0.67	0.88
22.	Informasi laporan realisasi anggaran seluruh SKPD	1	1	1	0	1	0.67	0.88
23.	Informasi laporan realisasi anggaran PPKD	1	1	1	0	1	0.67	0.88
24.	Informasi Neraca	1	1	1	0	1	0.67	0.88
25.	Informasi CaLK Pemerintah Daerah	1	1	1	0	1	0.67	0.88

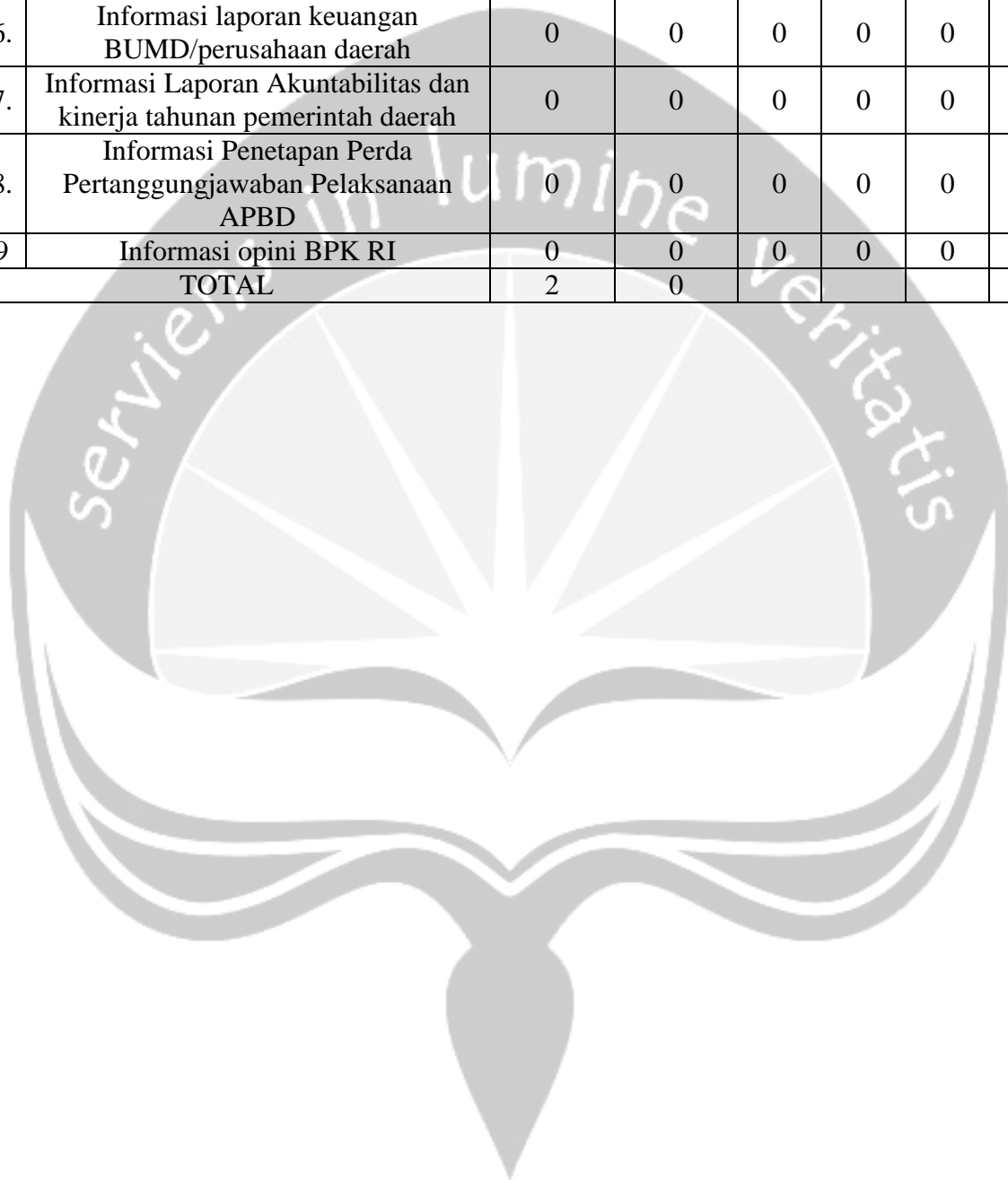


KABUPATEN KEBUMEN								
No	Instrumen	Kriteria						Jumlah
		Tersedia	Dapat Diakses	Frekuensi Pengungkapan				
				2014	2015	2016	Hasil	
26.	Informasi laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah	0	0	0	0	0	0	0
27.	Informasi Laporan Akuntabilitas dan kinerja tahunan pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0
28.	Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	1	1	0	0	0.33	0.77
29.	Informasi opini BPK RI	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		15	15				10.35	13.32



KABUPATEN BANDUNG BARAT								
No	Instrumen	Kriteria						Jumlah
		Tersedia	Dapat Diakses	Frekuensi Pengungkapan				
				2014	2015	2016	Hasil	
1.	Informasi ringkasan dokumen RKPD	0	0	0	0	0	0	0
2.	Informasi kebijakan umum anggaran	0	0	0	0	0	0	0
3.	Informasi ringkasan dokumen prioritas dan plafon anggaran	0	0	0	0	0	0	0
4.	Informasi ringkasan dokumen RKA-SKPD	0	0	0	0	0	0	0
5.	Informasi ringkasan dokumen RKA-PPKD	0	0	0	0	0	0	0
6.	Informasi ringkasan dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD	0	0	0	0	0	0	0
7.	Informasi peraturan daerah tentang APBD	1	0	0	0	1	0.33	0.44
8.	Informasi peraturan kepala daerah tentang APBD	0	0	0	0	0	0	0
9.	Informasi ringkasan DPA SKPD	0	0	0	0	0	0	0
10.	Informasi DPA SKPD	0	0	0	0	0	0	0
11.	Informasi realisasi pendapatan daerah	0	0	0	0	0	0	0
12.	Informasi realisasi belanja daerah	0	0	0	0	0	0	0
13.	Informasi realisasi pembiayaan daerah	0	0	0	0	0	0	0
14.	Informasi ringkasan dokumen rancangan perubahan APBD	0	0	0	0	0	0	0
15.	Informasi peraturan daerah tentang perubahan APBD	0	0	0	0	0	0	0
16.	Informasi peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	0	0	0	0	0	0	0
17.	Informasi ringkasan RKA perubahan APBD	0	0	0	0	0	0	0
18.	Informasi rencana umum pengadaan	0	0	0	0	0	0	0
19.	Informasi SK kepala daerah tentang pejabat pengelola keuangan daerah	0	0	0	0	0	0	0
20.	Informasi peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi	0	0	0	0	0	0	0
21.	Informasi laporan arus kas	0	0	0	0	0	0	0
22.	Informasi laporan realisasi anggaran seluruh SKPD	1	0	0	0	1	0.33	0.44
23.	Informasi laporan realisasi anggaran PPKD	0	0	0	0	0	0	0
24.	Informasi Neraca	0	0	0	0	0	0	0
25.	Informasi CaLK Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	0

KABUPATEN BANDUNG BARAT								
No	Instrumen	Kriteria						Jumlah
		Tersedia	Dapat Diakses	Frekuensi Pengungkapan				
				2014	2015	2016	Hasil	
26.	Informasi laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah	0	0	0	0	0	0	0
27.	Informasi Laporan Akuntabilitas dan kinerja tahunan pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0
28.	Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0	0	0	0	0	0	0
29	Informasi opini BPK RI	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		2	0				0.66	0.88

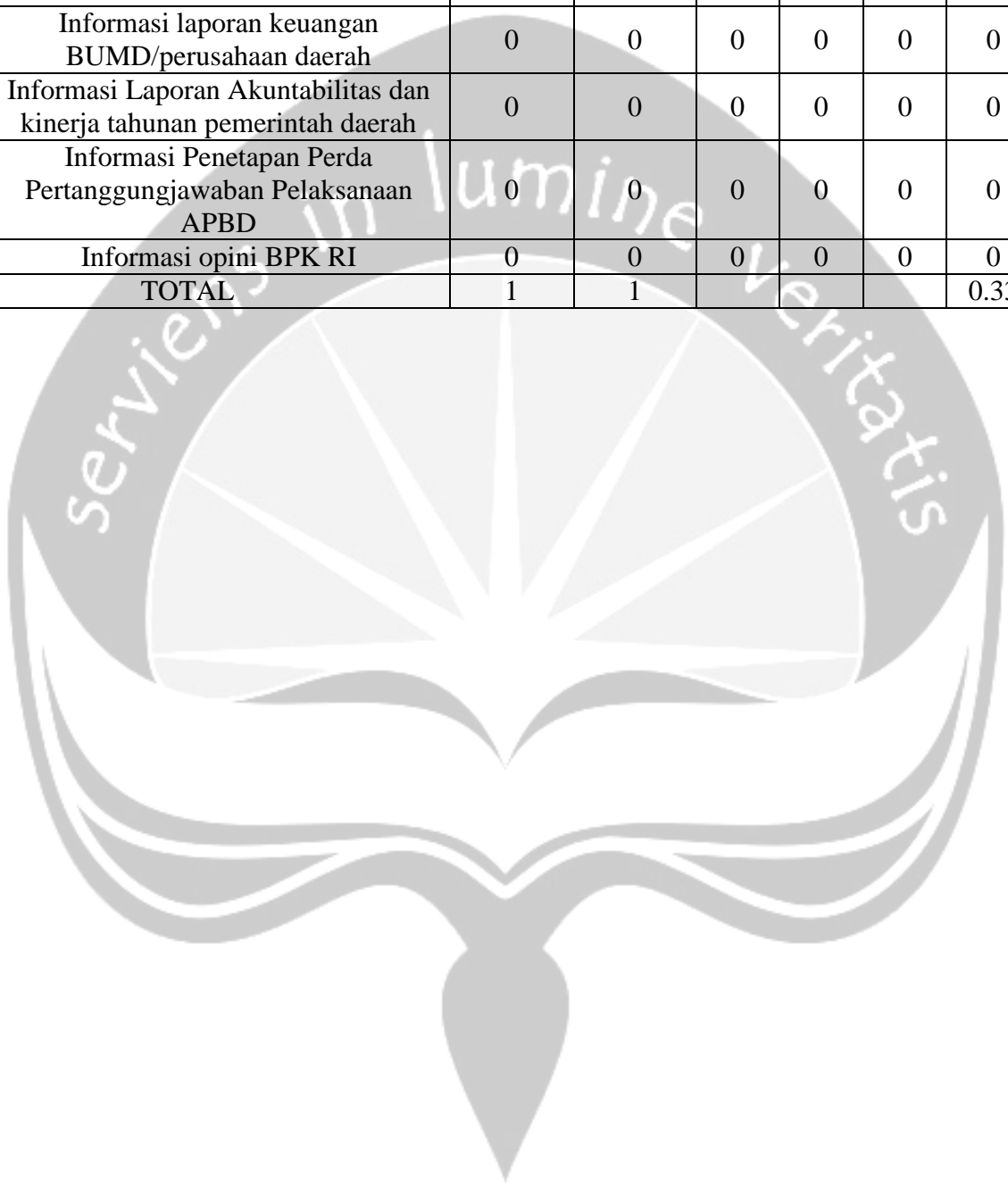


KABUPATEN BEKASI

No	Instrumen	Kriteria						Jumlah
		Tersedia	Dapat Diakses	Frekuensi Pengungkapan				
				2014	2015	2016	Hasil	
1.	Informasi ringkasan dokumen RKPD	0	0	0	0	0	0	0
2.	Informasi kebijakan umum anggaran	0	0	0	0	0	0	0
3.	Informasi ringkasan dokumen prioritas dan plafon anggaran	0	0	0	0	0	0	0
4.	Informasi ringkasan dokumen RKA-SKPD	0	0	0	0	0	0	0
5.	Informasi ringkasan dokumen RKA-PPKD	0	0	0	0	0	0	0
6.	Informasi ringkasan dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD	0	0	0	0	0	0	0
7.	Informasi peraturan daerah tentang APBD	1	1	0	1	0	0.33	0.77
8.	Informasi peraturan kepala daerah tentang APBD	0	0	0	0	0	0	0
9.	Informasi ringkasan DPA SKPD	0	0	0	0	0	0	0
10.	Informasi DPA SKPD	0	0	0	0	0	0	0
11.	Informasi realisasi pendapatan daerah	0	0	0	0	0	0	0
12.	Informasi realisasi belanja daerah	0	0	0	0	0	0	0
13.	Informasi realisasi pembiayaan daerah	0	0	0	0	0	0	0
14.	Informasi ringkasan dokumen rancangan perubahan APBD	0	0	0	0	0	0	0
15.	Informasi peraturan daerah tentang perubahan APBD	0	0	0	0	0	0	0
16.	Informasi peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	0	0	0	0	0	0	0
17.	Informasi ringkasan RKA perubahan APBD	0	0	0	0	0	0	0
18.	Informasi rencana umum pengadaan	0	0	0	0	0	0	0
19.	Informasi SK kepala daerah tentang pejabat pengelola keuangan daerah	0	0	0	0	0	0	0
20.	Informasi peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi	0	0	0	0	0	0	0
21.	Informasi laporan arus kas	0	0	0	0	0	0	0
22.	Informasi laporan realisasi anggaran seluruh SKPD	0	0	0	0	0	0	0
23.	Informasi laporan realisasi anggaran PPKD	0	0	0	0	0	0	0
24.	Informasi Neraca	0	0	0	0	0	0	0
25.	Informasi CaLK Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	0

**KABUPATEN BEKASI**

No	Instrumen	Kriteria						Jumlah
		Tersedia	Dapat Diakses	Frekuensi Pengungkapan				
				2014	2015	2016	Hasil	
26.	Informasi laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah	0	0	0	0	0	0	0
27.	Informasi Laporan Akuntabilitas dan kinerja tahunan pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0
28.	Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0	0	0	0	0	0	0
29	Informasi opini BPK RI	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		1	1				0.33	0.77

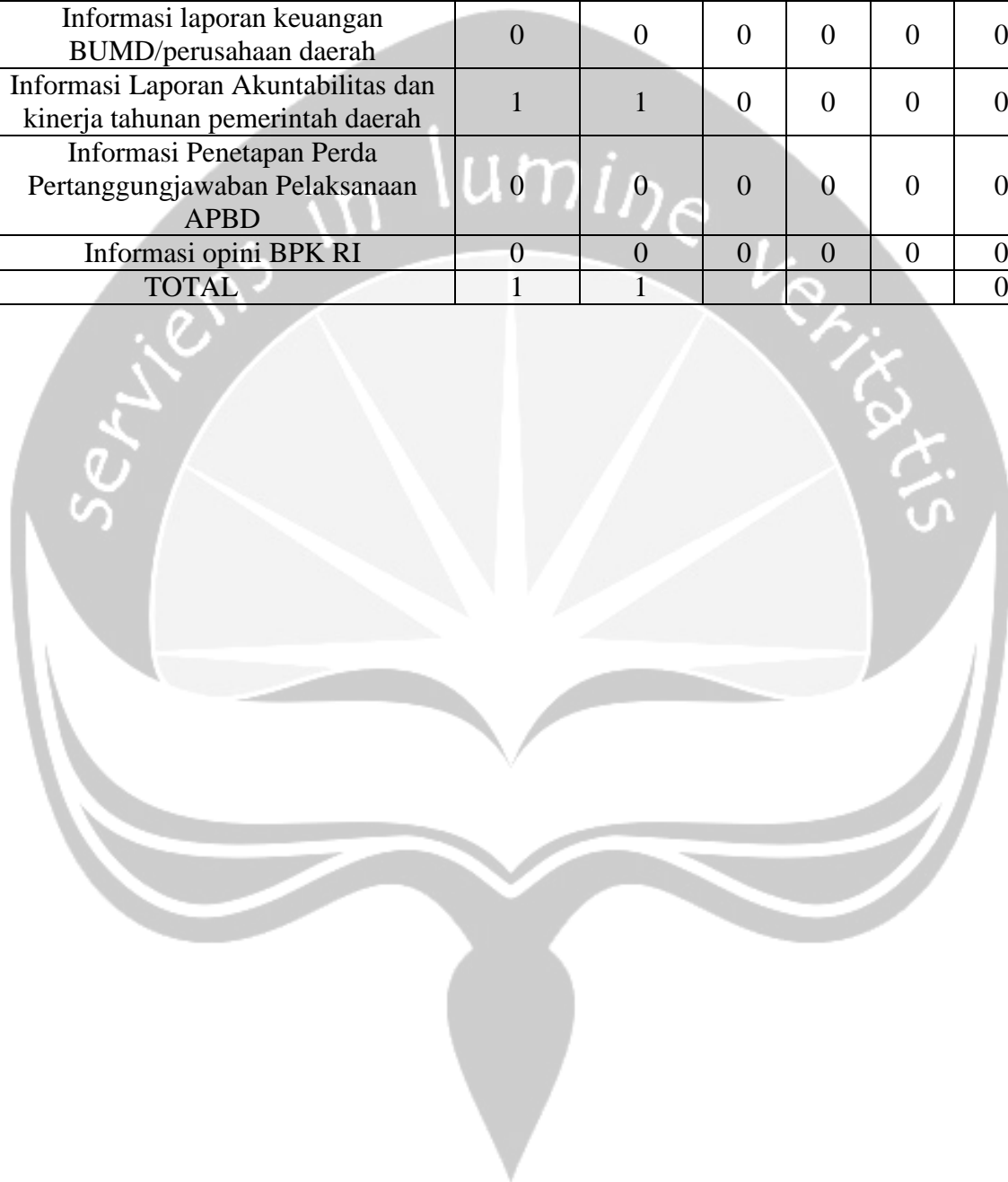


**KABUPATEN KLUKUNG**

No	Instrumen	Kriteria						Jumlah
		Tersedia	Dapat Diakses	Frekuensi Pengungkapan				
				2014	2015	2016	Hasil	
1.	Informasi ringkasan dokumen RKPD	0	0	0	0	0	0	0
2.	Informasi kebijakan umum anggaran	0	0	0	0	0	0	0
3.	Informasi ringkasan dokumen prioritas dan plafon anggaran	0	0	0	0	0	0	0
4.	Informasi ringkasan dokumen RKA-SKPD	0	0	0	0	0	0	0
5.	Informasi ringkasan dokumen RKA-PPKD	0	0	0	0	0	0	0
6.	Informasi ringkasan dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD	0	0	0	0	0	0	0
7.	Informasi peraturan daerah tentang APBD	0	0	0	0	0	0	0
8.	Informasi peraturan kepala daerah tentang APBD	0	0	0	0	0	0	0
9.	Informasi ringkasan DPA SKPD	0	0	0	0	0	0	0
10.	Informasi DPA SKPD	0	0	0	0	0	0	0
11.	Informasi realisasi pendapatan daerah	0	0	0	0	0	0	0
12.	Informasi realisasi belanja daerah	0	0	0	0	0	0	0
13.	Informasi realisasi pembiayaan daerah	0	0	0	0	0	0	0
14.	Informasi ringkasan dokumen rancangan perubahan APBD	0	0	0	0	0	0	0
15.	Informasi peraturan daerah tentang perubahan APBD	0	0	0	0	0	0	0
16.	Informasi peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	0	0	0	0	0	0	0
17.	Informasi ringkasan RKA perubahan APBD	0	0	0	0	0	0	0
18.	Informasi rencana umum pengadaan	0	0	0	0	0	0	0
19.	Informasi SK kepala daerah tentang pejabat pengelola keuangan daerah	0	0	0	0	0	0	0
20.	Informasi peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi	0	0	0	0	0	0	0
21.	Informasi laporan arus kas	0	0	0	0	0	0	0
22.	Informasi laporan realisasi anggaran seluruh SKPD	0	0	0	0	0	0	0
23.	Informasi laporan realisasi anggaran PPKD	0	0	0	0	0	0	0
24.	Informasi Neraca	0	0	0	0	0	0	0
25.	Informasi CaLK Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	0

**KABUPATEN KLUKUNG**

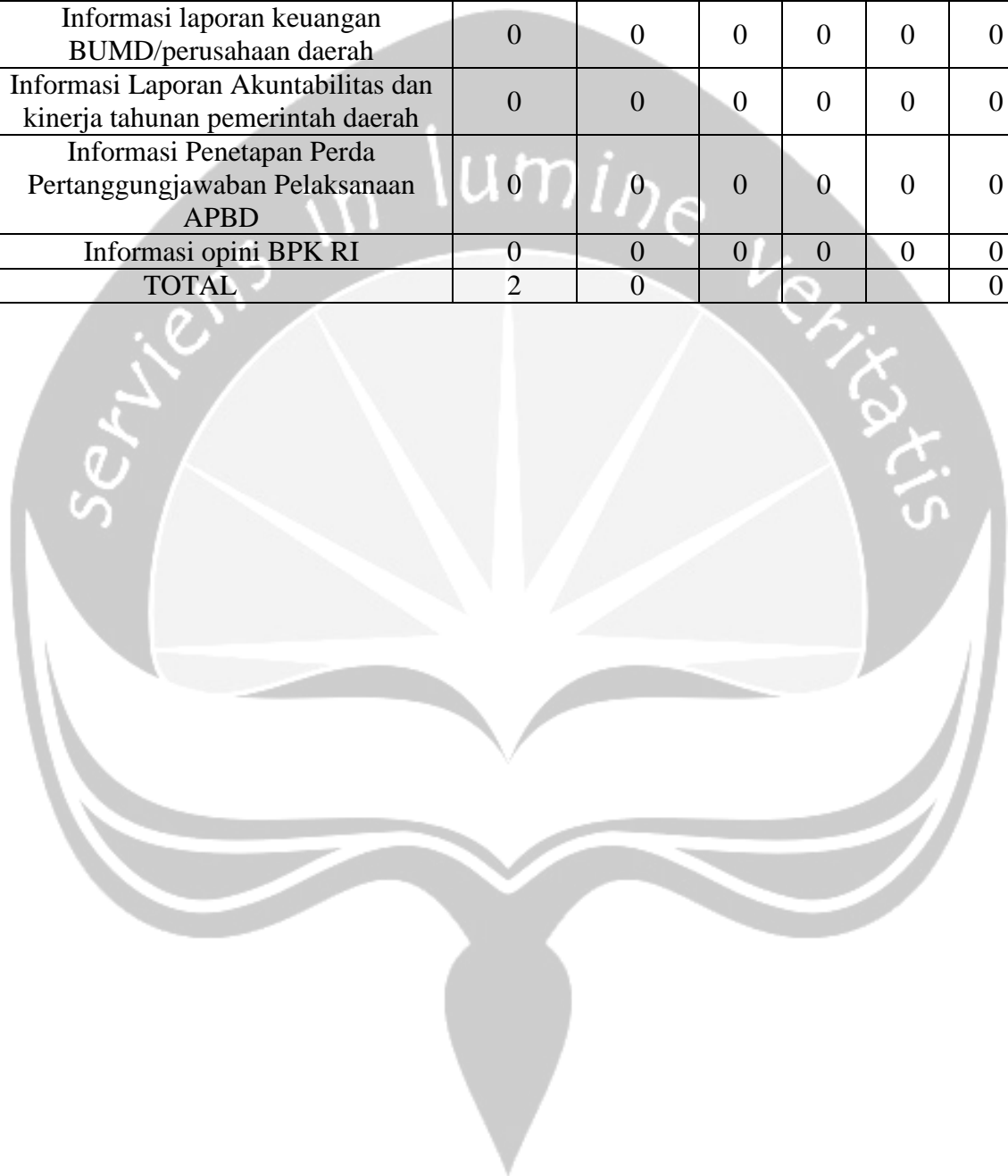
No	Instrumen	Kriteria						Jumlah
		Tersedia	Dapat Diakses	Frekuensi Pengungkapan				
				2014	2015	2016	Hasil	
26.	Informasi laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah	0	0	0	0	0	0	0
27.	Informasi Laporan Akuntabilitas dan kinerja tahunan pemerintah daerah	1	1	0	0	0	0	0.66
28.	Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0	0	0	0	0	0	0
29	Informasi opini BPK RI	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		1	1				0	0.66



KABUPATEN BULELENG								
No	Instrumen	Kriteria						Jumlah
		Tersedia	Dapat Diakses	Frekuensi Pengungkapan				
				2014	2015	2016	Hasil	
1.	Informasi ringkasan dokumen RKPD	0	0	0	0	0	0	0
2.	Informasi kebijakan umum anggaran	0	0	0	0	0	0	0
3.	Informasi ringkasan dokumen prioritas dan plafon anggaran	0	0	0	0	0	0	0
4.	Informasi ringkasan dokumen RKA-SKPD	0	0	0	0	0	0	0
5.	Informasi ringkasan dokumen RKA-PPKD	0	0	0	0	0	0	0
6.	Informasi ringkasan dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD	0	0	0	0	0	0	0
7.	Informasi peraturan daerah tentang APBD	0	0	0	0	0	0	0
8.	Informasi peraturan kepala daerah tentang APBD	0	0	0	0	0	0	0
9.	Informasi ringkasan DPA SKPD	0	0	0	0	0	0	0
10.	Informasi DPA SKPD	0	0	0	0	0	0	0
11.	Informasi realisasi pendapatan daerah	1	0	0	0	0	0	0.33
12.	Informasi realisasi belanja daerah	1	0	0	0	0	0	0.33
13.	Informasi realisasi pembiayaan daerah	0	0	0	0	0	0	0
14.	Informasi ringkasan dokumen rancangan perubahan APBD	0	0	0	0	0	0	0
15.	Informasi peraturan daerah tentang perubahan APBD	0	0	0	0	0	0	0
16.	Informasi peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	0	0	0	0	0	0	0
17.	Informasi ringkasan RKA perubahan APBD	0	0	0	0	0	0	0
18.	Informasi rencana umum pengadaan	0	0	0	0	0	0	0
19.	Informasi SK kepala daerah tentang pejabat pengelola keuangan daerah	0	0	0	0	0	0	0
20.	Informasi peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi	0	0	0	0	0	0	0
21.	Informasi laporan arus kas	0	0	0	0	0	0	0
22.	Informasi laporan realisasi anggaran seluruh SKPD	0	0	0	0	0	0	0
23.	Informasi laporan realisasi anggaran PPKD	0	0	0	0	0	0	0
24.	Informasi Neraca	0	0	0	0	0	0	0
25.	Informasi CaLK Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	0



KABUPATEN BULELENG								
No	Instrumen	Kriteria						Jumlah
		Tersedia	Dapat Diakses	Frekuensi Pengungkapan				
				2014	2015	2016	Hasil	
26.	Informasi laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah	0	0	0	0	0	0	0
27.	Informasi Laporan Akuntabilitas dan kinerja tahunan pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0
28.	Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0	0	0	0	0	0	0
29	Informasi opini BPK RI	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		2	0				0	0.66



**KABUPATEN BONDOWOSO**

No	Instrumen	Kriteria						Jumlah
		Tersedia	Dapat Diakses	Frekuensi Pengungkapan				
				2014	2015	2016	Hasil	
1.	Informasi ringkasan dokumen RKPD	1	0	0	0	0	0	0.33
2.	Informasi kebijakan umum anggaran	0	0	0	0	0	0	0
3.	Informasi ringkasan dokumen prioritas dan plafon anggaran	0	0	0	0	0	0	0
4.	Informasi ringkasan dokumen RKA-SKPD	0	0	0	0	0	0	0
5.	Informasi ringkasan dokumen RKA-PPKD	0	0	0	0	0	0	0
6.	Informasi ringkasan dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD	0	0	0	0	0	0	0
7.	Informasi peraturan daerah tentang APBD	1	0	0	0	0	0	0.33
8.	Informasi peraturan kepala daerah tentang APBD	0	0	0	0	0	0	0
9.	Informasi ringkasan DPA SKPD	0	0	0	0	0	0	0
10.	Informasi DPA SKPD	0	0	0	0	0	0	0
11.	Informasi realisasi pendapatan daerah	0	0	0	0	0	0	0
12.	Informasi realisasi belanja daerah	0	0	0	0	0	0	0
13.	Informasi realisasi pembiayaan daerah	0	0	0	0	0	0	0
14.	Informasi ringkasan dokumen rancangan perubahan APBD	0	0	0	0	0	0	0
15.	Informasi peraturan daerah tentang perubahan APBD	0	0	0	0	0	0	0
16.	Informasi peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	0	0	0	0	0	0	0
17.	Informasi ringkasan RKA perubahan APBD	0	0	0	0	0	0	0
18.	Informasi rencana umum pengadaan	0	0	0	0	0	0	0
19.	Informasi SK kepala daerah tentang pejabat pengelola keuangan daerah	0	0	0	0	0	0	0
20.	Informasi peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi	0	0	0	0	0	0	0
21.	Informasi laporan arus kas	0	0	0	0	0	0	0
22.	Informasi laporan realisasi anggaran seluruh SKPD	0	0	0	0	0	0	0
23.	Informasi laporan realisasi anggaran PPKD	0	0	0	0	0	0	0
24.	Informasi Neraca	0	0	0	0	0	0	0
25.	Informasi CaLK Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	0

**KABUPATEN BONDOWOSO**

No	Instrumen	Kriteria						Jumlah
		Tersedia	Dapat Diakses	Frekuensi Pengungkapan				
				2014	2015	2016	Hasil	
26.	Informasi laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah	0	0	0	0	0	0	0
27.	Informasi Laporan Akuntabilitas dan kinerja tahunan pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0
28.	Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0	0	0	0	0	0	0
29	Informasi opini BPK RI	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0.66</b>

